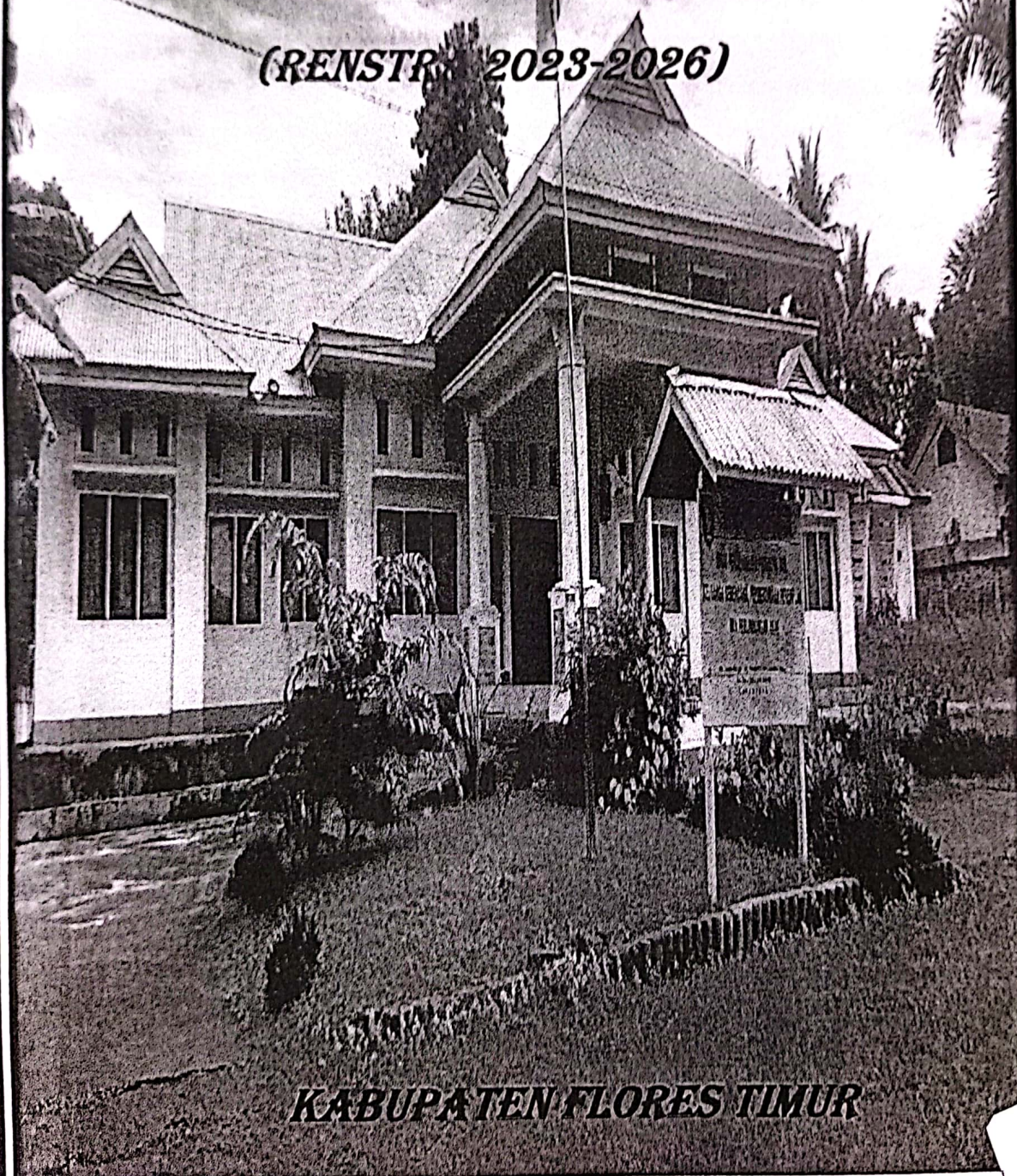


**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTR 2023-2026)**



KABUPATEN FLORES TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 yang dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur empat tahun kedepan. Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang realitis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan selesainya Renstra ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur dapat mempedomani Renstra ini sehingga tujuan dan sasaran yang kita harapkan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur untuk empat tahun kedepan dapat dicapai. Terakhir kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi daerah. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan Renstra ini dimasa yang akan datang, terimakasih.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan anak
Kabupaten Flores Timur



Sri Ardi Rahaju, S.Sos, MAP
NIP.19691016 199903 2 007

BAB I PENDAHULUAN

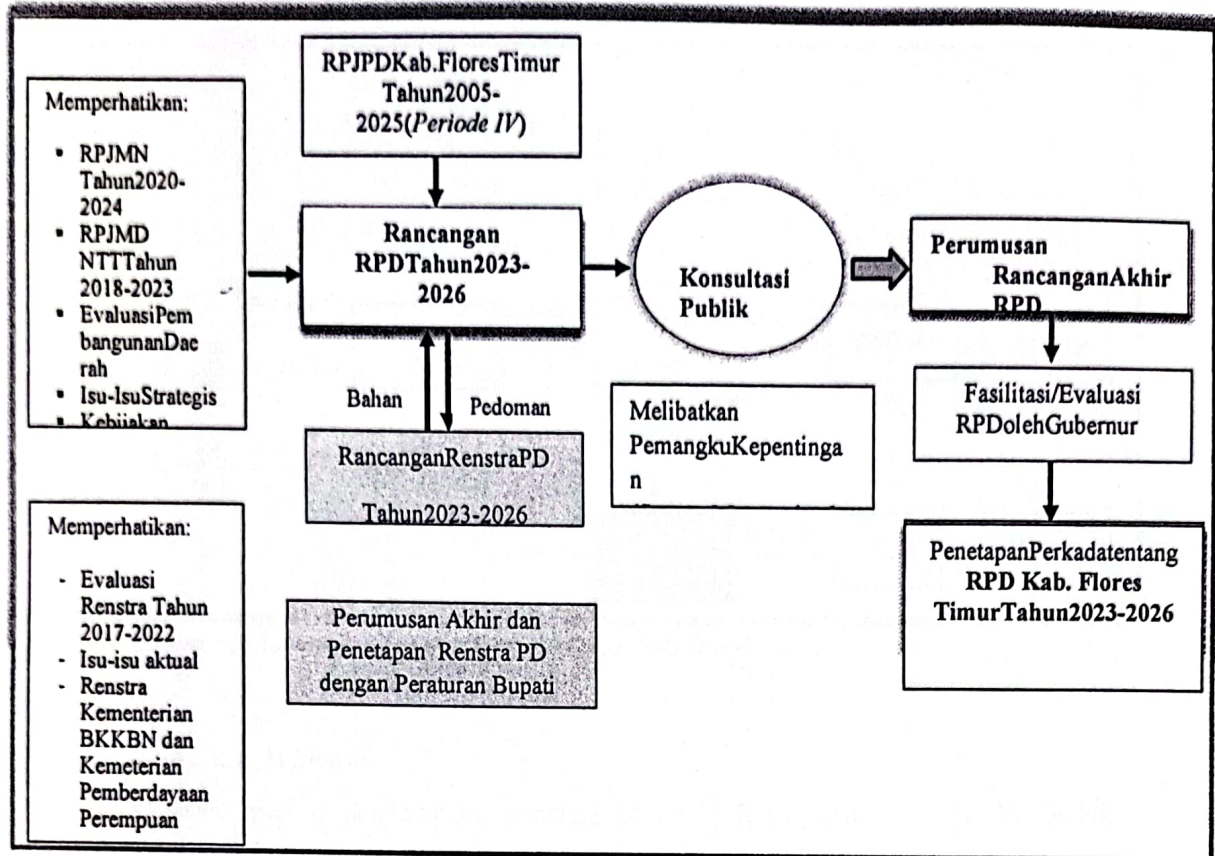
1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

RENSTRA disusun dengan memperhatikan, (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021; (c) evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; (g) saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan RENSTRA PD Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Gambar 1.



Alur penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Keterkaitan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;

The diagram illustrates the planning process flow in West Java Province, showing the hierarchy from national to local levels. The flow is as follows:

- National Level:** RPJM Nasional (National Medium-Term Development Plan) is the starting point. It is "Dijabarkan" (Detailed) into RKP (National Regional Development Plan).
- Provincial Level:** RPJM Nasional is "Diperhatikan" (Noticed/Reviewed) by RPD 2023-2026 (Provincial Medium-Term Development Plan). RKP is "Diacy" (Reviewed) by RKP Daerah (Regional Development Plan).
- Local Level:** RKP Daerah is "Diacy" (Reviewed) by RKA (Regional Development Plan) and "Bahan" (Material) for Renja PD (Regional Development Plan). RPD 2023-2026 is "Diacy" (Reviewed) by RKA and "Bahan" (Material) for Renja PD.
- Implementation:** RKA is "Pedoman" (Guideline) for RAPBD (Regional Annual Budget and Development Plan) and "Pedoman" (Guideline) for RKA (Regional Development Plan). RAPBD is "Pedoman" (Guideline) for APBD (Regional Annual Budget and Development Plan). RKA is "Pedoman" (Guideline) for DPA (Regional Development Plan).
- Supporting Documents:** RTRWN (National Regional Development Plan) is "Diacy" (Reviewed) by RPJPD (Provincial Medium-Term Development Plan). RTRWD (Regional Development Plan) is "Pedoman" (Guideline) for RPD 2023-2026. PWT (Provincial Work Plan) is "Pedoman" (Guideline) for RPD 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya Kepmen 050-5889;

6

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 40 Tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur;
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 sebagai dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Flores Timur dalam Jangka waktu empat

tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama empat tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan periode 2023-2026 yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Flores Timur 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;

Bab 2 : Gambaran Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur, memuat tugas pokok, fungsi, dan struktur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur, sumberdaya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur, kondisi dan kinerja

pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur, serta peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan

Bab 3 : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur, memuat identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya;

Bab 4: Tujuan dan Sasaran, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Bab 5: Strategi dan Arah Kebijakan, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam empat tahun mendatang.

Bab 6: Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan, pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab 7 : Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Bab 8: Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan kemudian dijabarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 40 tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi program unsur penunjang pemerintah yang meliputi perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, perencanaan pembangunan sosial budaya, manusia, masyarakat dan pemerintahan serta penelitian dan pengembangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- c. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- d. Pembinaan, Pengoordinasian dan Pengendalian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
 - 1) Seksi Advokasi dan Kerjasama
 - 2) Seksi Data dan Informasi
 - 3) Seksi Pengendalian Pergerakan Penduduk
- d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi
 - 2) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
 - 3) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesetaraan Keluarga Berencana
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Ekonomi Perempuan Keluarga Berencana
 - 2) Seksi Bina Sosial, Politik dan Hukum
 - 3) Seksi Bina Kualitas Keluarga
- f. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengasuh Alternatif dan Pendidikan
 - 2) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi

3) Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

g. Kelompok Jabatan Fungsional :

- 1) Fungsional Perencana
- 2) Fungsional Penata Kependudukan dan KB
- 3) Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
- 4) Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
- 5) Fungsional Analis Kebijakan

Sedangkan tugas dan fungsi setiap jenis jenjang jabatan struktural sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi dan teknis meliputi penyusunan program, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan dan pelaporan lingkup badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan
- b. penyusunan Program dan Anggaran
- c. pengelolaan Keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah
- d. pengelolaan urusan kepegawaian
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk. Bidang pengendalian penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja pengendalian penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk;

- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian penduduk;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan keluarga berencana. Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Keluarga Berencana;
- b. Perumusan kebijakan teknis Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Keluarga Berencana;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Keluarga Berencana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan. Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan perempuan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan perempuan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja perlindungan anak;
- b. Perumusan kebijakan teknis perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan anak;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perlindungan anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

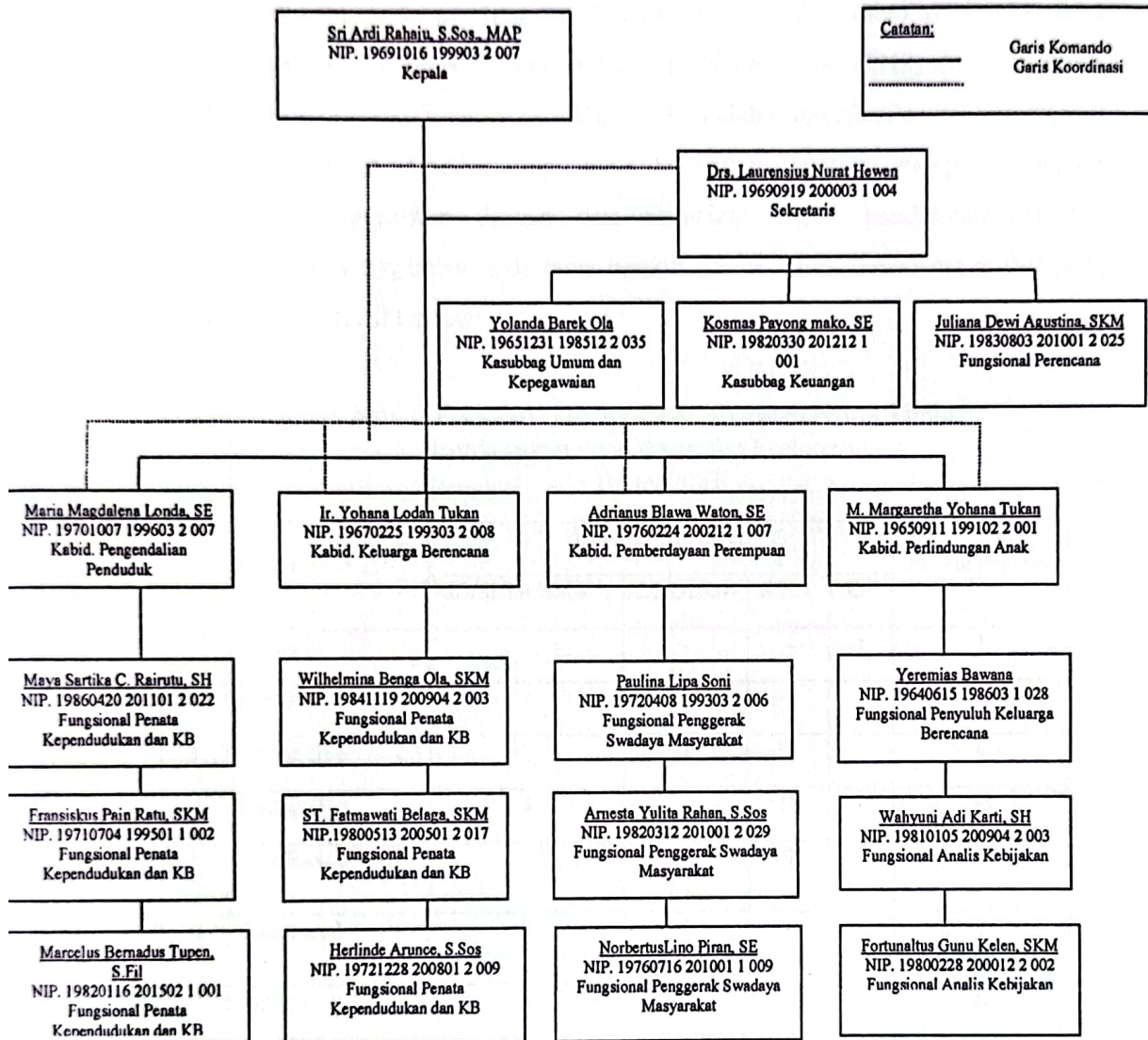
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan- kegiatan teknis di masing- masing bidang. Sedangkan fungsi jabatan fungsional yaitu:

- a. Jabatan fungsional dipimpin langsung oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada dinas

- b. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- c. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KABUPATEN
FLORES TIMUR



2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DP2KBP3A memiliki sumber daya manusia sebagai berikut: Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur, akhir tahun 2021, adalah sejumlah 22 orang, yang terdiri dari 24 laki-laki dan 27 perempuan. Dilihat dari sisi kapasitas dan profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan data eksisting tingkat pendidikan aparatur, sebagaimana tergambar pada tabel berikut. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut:

Tabel 2.1

Jumlah PNS Pada DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Pendidikan dan Eselonering
Tahun 2021

No	Eselon	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SD/SLTA/SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	-	-	-	1	1
2	Eselon III/a	-	0	1	-	1
3	Eselon III/b		1	3		4
4	Eselon IV	3	-	12	-	15
5	Non Eselon	-	-	0	-	0
6	Fungsional	7	1			8
	Jumlah	10	2	16	1	29

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur, 2021

Tabel 2.2
Jumlah PNS DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan
Tahun 2021

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	-	-	1	4	5
2	S1	-	-	9	2	11
3	D3/D2/D1	-	-	3	-	3
4	SMA	-	7	-	-	7
	Jumlah	-	7	13	6	26

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur, 2021

Tabel 2.3
Jumlah PNS DP2KBP3A di Setiap Kecamatan Kabupaten Flores Timur
Berdasarkan Pendidikan

No	Eselon	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SD/SLTA/SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Fungsional Tertentu	8	-	14	0	22
	Jumlah	8		14	0	22

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur, 2021

Tabel 2.4
Jumlah Tenaga Non PNS di DP2KBP3A dan Kecamatan Kabupaten Flores Timur
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No		Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SD/SLTA/SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Dilapangan	22	17	41	0	80
2	Dikantor	6	1	6	0	13
	Jumlah	29	18	47	0	93

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur, 2021

Tabel 2.5
Jumlah PNS DP2KBP3A di Kecamatan Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan
Tahun 2021

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	-	-	-	-	-
2	S1	-	-	9	5	14
3	D3/D2/D1	-	-	-	-	-
4	SMA	-	1	7	-	8
	Jumlah	-	1	16	5	22

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi dan kapasitas aparatur pada DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur kurang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD sebagai aparatur perencana.

Tabel 2.6
Kondisi Asset/Inventaris Kantor DP2KBP3A

a. Inventaris Barang B
PERALATAN DAN MESIN

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7
1	1.3.2.02.01.06.03	Mobil Unit Penerangan Darat	Izusu/Panther	1992	Rusak Berat	1
2	1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor	Astrea Legenda	2003	Rusak Berat	1
3	1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor	Suzuki Thunder / EN 125 CC	2008	Rusak Berat	39
4	1.3.2.02.01.06.03	Mobil Unit Penerangan Darat	Mitsubishi/Strada CR2	2009	Baik	1
5	1.3.2.07.01.03.15	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	-	2009	Fisik Tidak Ada, diserahkan	3

Rencana Strategis DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur 2023-2026

		Lainnya			kepada pihak ke 3	
6	1.3.2.07.01.21.22	Emergency Kit	-	2009	Fisik Tidak Ada, diserahkan kepada pihak ke 3	2
7	1.3.2.10.01.02.03	Note Book	-	2009	Fisik Tidak Ada	1
8	1.3.2.10.02.04.04	Modem	-	2009	Fisik Tidak Ada	1
9	1.3.2.02.01.06.18	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Mitsubishi / FE71	2010	Baik	1
10	1.3.2.05.02.06.12	Wireless	Krezt	2010	Rusak Berat	2
11	1.3.2.07.01.03.15	Alat Kedokteran Keluarga Berencana Lainnya	-	2010	Fisik Tidak Ada, diserahkan kepada pihak ke 3	2
12	1.3.2.10.01.02.03	Note Book	AXIO Infocus	2010	Fisik Tidak Ada, diserahkan kepada pihak ke 3	6
13	1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor	Suzuki Smash Titan / FW 110 SD	2011	Rusak Berat	5
14	1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor	Suzuki Smash Titan / FW 110 SD	2011	Baik	7
15	1.3.2.05.02.06.12	Wireless	Martin Roland / MA-2006	2011	Rusak Berat	-
16	1.3.2.10.01.02.01	P. C Unit	Acer 4775 Series	2011	Rusak Berat	-
17	1.3.2.10.01.02.03	Note Book	Acer 4775 Series	2011	Fisik Tidak Ada, diserahkan kepada pihak ke 3	8
18	1.3.2.05.01.04.02	Lemari Kayu	Dua Pintu	2012	Baik	3
19	1.3.2.05.01.04.04	Rak Kayu	4 Rak	2012	Baik	1
20	1.3.2.05.01.05.77	Papan Pengumuman	-	2012	Rusak Berat	1
21	1.3.2.05.02.01.02	Meja Kerja Kayu	½ Biro	2012	Baik	25

Rencana Strategis DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur 2023-2026

22	1.3.2.05.03.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Biro	2012	Baik	1
23	1.3.2.05.02.04.04	AC Split 4 PK	Panasonic	2012	Baik	1
24	1.3.2.05.02.04.04	AC Split 4 PK	Panasonic	2012	Rusak Berat	1
25	1.3.2.05.02.04.04	AC Split 1 PK	Panasonic	2012	Baik	2
26	1.3.2.05.02.07.01	Alat Pemadam/Portable	-	2012	Rusak Berat	-
27	1.3.2.07.01.01.169	Obyengbad	-	2012	Baik, diserahkan kepada pihak ke 3	19
28	1.3.2.07.01.01.169	Alat Kedokteran Umum Lainnya	-	2012	Baik	1
29	1.3.2.10.01.02.03	Note Book	-	2012	Baik	17
30	1.3.2.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / iP2770	2012	Rusak Berat	2
31	1.3.2.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2012	Rusak Berat	16
32	1.3.2.05.02.01.32	Kursi Putar	Besar	2013	Baik	2
33	1.3.2.05.02.01.32	Kursi Putar	Sedang	2013	Rusak Berat	5
34	1.3.2.07.01.03.15	Implankit	-	2013	Baik, diserahkan kepada pihak ke 3	37
35	1.3.2.10.01.02.03	Note Book	-	2013	Baik	11
36	1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor	Honda SupraX / APY12U21C07M/T	2014	Baik	6
37	1.3.2.02.01.06.18	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Izusu / NKR 55 CC E2-1	2014	Baik	1
38	1.3.2.05.02.01.02	Meja Kerja Kayu	½ Biro	2014	Baik	20
39	1.3.2.05.02.01.48	Sofa	Sudut	2014	Baik	1
40	1.3.2.10.01.02.01	P. C Unit	Lenovo	2014	Rusak Berat	2
41	1.3.2.05.01.04.02	Lemari Kayu	Dua Pintu	2015	Baik	4

Rencana Strategis DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur 2023-2026

42	1.3.2.05.01.05. 88	Overhead Projector	Ben Q Digital Projektor / MS504	2015	Baik	1
43	1.3.2.05.02.01. 02	Meja Kerja Kayu	½ Biro	2015	Baik	10
44	1.3.2.05.02.01. 04	Kursi Kayu	Biasa / Sandaran tanpa lengan	2015	Baik	10
45	1.3.2.05.02.04. 04	AC Split ½ PK	LG T05NLA	2015	Baik	2
46	1.3.2.05.02.04. 04	AC Split ½ PK	LG T05NLA	2015	Rusak Berat	2
47	1.3.2.05.02.04. 04	AC Split ½ PK	SAMSUNG AR05JRFLAWKNS E	2015	Baik	15
48	1.3.2.05.02.04. 07	Exhause Fan	MASPION / Pendingin Ruangan	2015	Baik	20
49	1.3.2.05.02.06. 27	Gordyn	MARJOLAIE / Fariasi	2015	Baik	7
50	1.3.2.07.01.01. 169	Obyengbad	-	2015	Baik, diserahkan kepada pihak ke 3	22
51	1.3.2.10.01.02. 02	Laptop	ACER ASPIRE E 14 / E5-471-349F	2015	Rusak Ringan	1
52	1.3.2.10.01.02. 02	Laptop	ACER ASPIRE E 14 / E5-471-39A1	2015	Rusak Ringan	2
53	1.3.2.10.01.02. 02	Laptop	ACER ASPIRE E 14 / E5-471-39A1	2015	Rusak Berat	1
54	1.3.2.10.01.02. 02	Laptop	TOSHIBA / TOSHIBA C55T	2015	Baik	5
55	1.3.2.10.02.03. 03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / iP2770	2015	Baik	10
56	1.3.2.02.01.01. 03	Station Wagon	Toyota / Rush 1,5 M/T	2016	Baik	1
57	1.3.2.05.01.04. 02	Lemari Kayu	Tiga Pintu	2016	Baik	5
58	1.3.2.05.01.04. 02	Lemari Kayu	Dua Pintu	2016	Baik	4
59	1.3.2.05.01.04. 04	Rak Kayu	5 Rak	2016	Baik	5
60	1.3.2.05.01.04. 04	Rak Kayu	3 Rak, Arsip	2016	Baik	5
61	1.3.2.05.01.05. 05	White Board	-	2016	Baik	5
62	1.3.2.05.01.05.	Overhead Projector	Ben Q / MS504 P/N :	2016	Baik	5

Rencana Strategis DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur 2023-2026

	88		4J.19R04.001 26b01.003			
63	1.3.2.05.01.05. 88	Overhead Projector	Ben Q	2016	Baik	1
64	1.3.2.05.01.05. 76	Papan Nama Instansi	Standar	2016	Baik	5
65	1.3.2.05.02.06. 59	Gordyn/Kray	-	2016	Baik	52
66	1.3.2.05.02.01. 02	Meja Kerja Kayu	½ Biro	2016	Baik	12
67	1.3.2.05.02.01. 04	Kursi Kayu	-	2016	Baik	4
68	1.3.2.05.02.01. 08	Meja Rapat	-	2016	Baik	20
69	1.3.2.05.02.01. 36	Kursi Lipat	Yamato HAA	2016	Baik	50
70	1.3.2.05.02.06. 05	Amplifier	Profesional Audio Amplifier	2016	Baik	1
71	1.3.2.05.02.06. 07	Loudspeaker	-	2016	Baik	1
72	1.3.2.05.02.06. 14	Microphone	Sonic	2016	Baik	1
73	1.3.2.05.02.06. 14	Microphone	Sonic	2016	Fisik Tidak Ada	1
74	1.3.2.05.02.06. 77	Kabel Salon	-	2016	Baik	1
75	1.3.2.05.01.04. 02	Lemari Kayu	Dua Pintu	2017	Baik	3
76	1.3.2.05.01.04. 04	Rak Kayu	Arsip	2017	Baik	3
77	1.3.2.05.01.04. 07	Brandkas	-	2017	Baik	1
78	1.3.2.05.01.05. 05	White Board	Biasa	2017	Baik	3
79	1.3.2.05.01.05. 88	Overhead Projector	INN224	2017	Baik	3
80	1.3.2.05.01.05. 76	Papan Nama Instansi	Standar	2017	Baik	3
81	1.3.2.05.02.01. 02	Meja Kerja Kayu	½ Biro	2017	Baik	6
82	1.3.2.05.02.01. 08	Meja Rapat	Panjang	2017	Baik	12
83	1.3.2.05.02.01.	Kursi Putar	Malvin	2017	Baik	3

Rencana Strategis DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur 2023-2026

	32					
84	1.3.2.05.02.01.36	Kursi Lipat	New Star	2017	Baik	15
85	1.3.2.05.02.03.03	Mesin Pemotong Rumput	Gold / TT-BG328	2017	Baik	1
86	1.3.2.05.02.04.03	AC Window 1 PK	LG / T10EMV	2017	Baik	9
87	1.3.2.05.02.04.07	Exhaust Fan	Panasonic	2017	Baik	12
88	1.3.2.10.01.02.02	Laptop	TOSHIBA / Intel Core i5	2017	Rusak Berat	2
89	1.3.2.10.01.02.02	Laptop	Lenovo	2017	Baik	3
90	1.3.2.10.01.02.02	Laptop	Lenovo / Grafis, intel HD	2017	Baik	1
91	1.3.2.10.02.02.09	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	-	2017	Baik	3
92	1.3.2.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma / iP28705	2017	Baik	3
93	1.3.2.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L120 / Injek Printer	2017	Baik	3
94	1.3.2.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L120	2017	Rusak Berat	1
95	1.3.2.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Deskjet / GT	2017	Baik	1
96	1.3.2.05.01.04.02	Lemari Kayu	Dua Pintu	2018	Baik	5
97	1.3.2.05.01.04.04	Rak Kayu	Tiga Rak, Arsip	2018	Baik	5
98	1.3.2.05.01.05.05	White Board	Keiko White Board	2018	Baik	5
99	1.3.2.05.01.05.88	Overhead Projector	Infocus / INN244	2018	Baik	5
100	1.3.2.05.01.05.76	Papan Nama Instansi	-	2018	Baik	5
101	1.3.2.05.02.01.02	Meja Kerja Kayu	½ Biro	2018	Baik	5
102	1.3.2.05.02.01.08	Meja Rapat	-	2018	Baik	10
103	1.3.2.05.02.01.32	Kursi Putar	Ergosit	2018	Baik	5
104	1.3.2.05.02.04.03	AC Window	Sharp / AH-A9UCY AC	2018	Baik	10

Rencana Strategis DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur 2023-2026

105	1.3.2.05.02.04.07	Exhaust Fan	Panasonic / AH-A9UCY AC	2018	Baik	10
106	1.3.2.10.01.02.02	Laptop	Acer Aspire / ES 475-541U	2018	Baik	6
107	1.3.2.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma / iP2770	2018	Baik	6
108	1.3.2.05.01.04.02	Lemari Kayu	Arsip, Dua Pintu	2019	Baik	3
109	1.3.2.05.01.04.04	Rak Kayu	Tiga Rak, Arsip	2019	Baik	3
110	1.3.2.05.01.05.05	White Board	-	2019	Baik	3
111	1.3.2.05.01.05.88	Overhead Projector	Nec LCD Proyektor / MC - 331XG	2019	Baik	3
112	1.3.2.05.01.05.76	Papan Nama Instansi	Biasa	2019	Baik	3
113	1.3.2.05.02.01.02	Meja Kerja Kayu	½ Biro	2019	Baik	6
114	1.3.2.05.02.01.04	Kursi Kayu	Biasa	2019	Baik	6
115	1.3.2.05.02.01.08	Meja Rapat	Panjang	2019	Baik	12
116	1.3.2.05.02.01.32	Kursi Putar	Putar	2019	Baik	3
117	1.3.2.05.02.01.36	Kursi Lipat	Chitose Leon	2019	Baik	15
118	1.3.2.05.02.04.03	AC Window 1 PK	LG	2019	Baik	9
119	1.3.2.05.02.04.07	Exhaust Fan	-	2019	Baik	12
120	1.3.2.06.02.06.07	Alat Komunikasi Sosial Lainnya (dts)	Samsung / Smartphone Galaxy S8 (G950) Black	2019	Baik	29
121	1.3.2.10.01.02.03	Note Book	Acer / Aspire	2019	Baik	3
122	1.3.2.10.01.02.03	Note Book	Asus A407UF17/VGA/WI N10	2019	Baik	9
123	1.3.2.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson /Inject L-3110	2019	Baik	12
124	1.3.2.07.01.21.22	Emergency Kit	-	2009	Fisik Tidak Ada	18
125	1.3.2.05.02.01.30	Kursi Rapat	-	2012	Baik	26

Rencana Strategis DP2KBPJA Kabupaten Flores Timur 2023-2026

126	1.3.2.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2012	Baik	1
127	1.3.2.05.02.01.29	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napolly	2013	Baik	29
128	1.3.2.05.02.01.04	Kursi Kayu	Biasa	2014	Baik	19
129	1.3.2.05.02.03.07	Tempat Sampah	-	2016	Baik	25
130	1.3.2.05.02.06.77	Kabel Salon	-	2016	Baik	1
131	1.3.2.05.02.01.29	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napolly	2017	Baik	75
132	1.3.2.05.02.03.07	Tempat Sampah	Maspion / Plastik	2017	Baik	15
133	1.3.2.05.02.01.04	Kursi Kayu	Panjang	2018	Baik	25
134	1.3.2.05.02.03.07	Tempat Sampah	-	2018	Baik	10
135	1.3.2.05.02.01.30	Kursi Rapat	Napolly / Sandar	2019	Baik	75
136	1.3.2.05.02.03.07	Tempat Sampah	SP Elite	2019	Baik	15
137	1.3.2.10.01.02.02	Laptop	Asus A409FJ	2020	Baik	3
138	1.3.2.10.01.02.01	PC Unit Komputer	Lenovo	2020	Baik	1
139	1.3.2.10.02.03.03	Printer	Canon Pixma G2010	2020	Baik	3
140	1.3.2.10.02.03.03	Printer	Epson -3150	2020	Baik	1
141	1.3.2.05.01.05.88	Overhead Projector (LCD)	Sony FPL-EX435 + Layar	2020	Baik	3
142	1.3.2.05.01.05.76	Papan Nama Balai Penyuluh	Papan Nama	2020	Baik	3
143	1.3.2.05.01.05.76	Papan Rumah Data	Papan Nama	2020	Baik	1
144	1.3.2.05.01.05.34	Displai Data	Papan Data	2020	Baik	1
145	1.3.2.05.01.05.88	Leafleat Rumah Data	Stiker	2020	Baik	500
146	1.3.2.05.02.01.24	Meja ½ Biro	½ Biro	2020	Baik	6
147	1.3.2.05.01.04.	Lemari Kayu	Dua Pintu, Jati	2020	Baik	3

Rencana Strategis DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur 2023-2026

	02					
148	1.3.2.05.03.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Rgosip / Spon	2020	Baik	3
149	1.3.2.05.01.04.04	Rak Buku	Jati	2020	Baik	4
150	1.3.2.05.01.05.05	Papan White Board	Keiko White Board	2020	Baik	3
151	1.3.2.05.02.01.08	Meja Rapat	Jati	2020	Baik	12
152	1.3.2.05.02.01.36	Kursi Lipat	Citose Leon / Spon	2020	Baik	15
153	1.3.2.05.02.01.04	Kursi Kerja/Kursi Kayu	Jati	2020	Baik	6
154	1.3.2.05.02.01.30	Kursi Rapat	Sander Napoli	2020	Baik	75
155	1.3.2.05.03.06.03	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	Sofa Sudut	2020	Baik	1
156	1.3.2.05.03.06.05	Kursi Lipat	Fortune	2020	Baik	4
157	1.3.2.05.03.07.05	Bufet Kaca	Dua Pintu	2020	Baik	1
158	1.3.2.05.02.03.07	Tempat Sampah	SP Elite	2020	Baik	15
159	1.3.2.05.02.04.03	AC Window	Sharp I PK AH-A9UCY	2020	Baik	9
160	1.3.2.05.02.04.07	Exhaust Fan	Panasonic FV-30 RUNS	2020	Baik	12
161	1.3.2.01.03.05.10	Pompa Air	-	2015	Rusak Berat	1
162	1.3.2.05.02.01.24	Meja ½ Biro	½ Biro	2021	Baik	2
163	1.3.2.05.02.04.04	AC Split	LG	2021	Baik	2
164	1.3.2.05.01.05.88	Detektor Asap dan Panas	First Alert	2021	Baik	1
165	1.3.2.05.02.04.07	Exhaustfan	Panasonic	2021	Baik	2
166	1.3.2.05.02.04.06	Kipas Angin	Maspion	2021	Baik	2
167	1.3.2.01.01.10.15	Hand Palet Truck	SFH-1210 LIGHT DUTY	2021	Baik	22
168	1.3.2.05.01.05.76	Papan Petunjuk	Kayu Jati	2021	Baik	1

169	1.3.2.05.01.05.88	Tangga	Livesa LV 225	2021	Baik	1
170	1.3.2.05.02.03.07	Tempat Sampah	SP Elite	2021	Baik	1
171	1.3.2.02.02.01.13	Trolly Pengangkut Barang	HandTruck Bordes	2021	Baik	1
172	1.3.2.05.01.05.88	Vacum Cleaner	Bolder	2021	Baik	1
173	1.3.2.05.02.07.01	Alat Pemadam/Portable	Tabung Pemadam/Merdekan	2021	Baik	1
174	1.3.2.05.02.01.32	Kursi Putar	Kursi Roda/Polaris (Haig Kualiti)	2021	Baik	6
175	1.3.2.05.01.04.02	Lemari Kayu	Arsip/DataScrip/Kaca 1,2 mm	2021	Baik	7
176	1.3.2.05.01.04.02	Lemari Kayu	Arsip/Multi Fungsi 4 Rak	2021	Baik	2
177	1.3.2.07.01.03.15	IUD KIT	IUD KIT (Alat Kontrasepsi Untuk Wanita)	2021	Baik	10
178	1.3.2.07.01.03.15	Thermohygrometer	HUMIDITY HTC-2	2021	Baik	1
179	1.3.2.07.01.03.15	BKB Kit Stunting	-	2021	Baik	10
180	1.3.2.07.01.03.15	BKB Kit Siap Nikah	-	2021	Baik	10
181	1.3.2.05.02.01.09	Tempat Tidur Besi	Obgin Bad	2021	Baik	14
182	1.3.2.02.03.02.01	Speed Boat / Motor Tempel	Motor Laut / YAMAHA 2X150 PK	2021	Baik	1
Jumlah						1.963

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur, 2021

**b. Inventaris Barang C
GEDUNG DAN BANGUNAN**

No. Urut	Jenis Barang>Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Ket
1	2	3	4

1	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	Gudang DP2KBP3A, Kel. PTW. BAO, Kec. Larantuka
2	Gedung Garasi / Pool Permanen	Baik	Garasi DP2KBP3A, Kel. PTW. BAO, Kec. Larantuka
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Kantor DP2KBP3A, Kel. Sarotari Timur, Kec. Larantuka
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Balai Penyuluh 19 Kecamatan
5	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	Gudang DP2KBP3A, Kel. Sarotari Timur, Kec. Larantuka

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur, 2021

**c. Inventaris Barang D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**

No. Urut	Jenis Barang>Nama Barang	Kondisi (B,KB,RB)	Ket
1	2	3	4
1	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	Baik	-
2	Jaringan Distribusi Lain-lain	Baik	Pengadaaan Meteran

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Beberapa indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencan, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD DP2KBP3A
Kabupaten Flores Timur

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat (bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang (unit)	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Pelaksanaan Penastasan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penerima Jasa administrasi pengelola keuangan (orang)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Kebersihan dan Alat Tulis kantor (jenis)	63	63	66	66	66	66	60	60	36	36	1	0,96	0,92	0,92	0,92
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan (Lembar)	61633	133260	133260	136667	136667	44600	82300	64600	25322	25322	0,72	0,81	0,39	0,19	0,19
Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Kantor (porsi)	760	1700	1794	1889	2000	122	860	440	36	36	0,16	0,50	0,23	0,3	0,3
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	49	89	90	96	100	23	80	23	23	23	0,46	0,89	0,25	0,24	0,24
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	61	64	70	76	76	70	73	74	93	93	1	1	1	1	1
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur															
Penyediaan Peralatan dan Penguatan Kantor	Jumlah Jenis kelengkapan gedung kantor (jenis)	0	0	2	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Penguatan Kantor	Jumlah Jenis peralatan gedung kantor (jenis)	3	2	2	2	2	0	6	6	0	0	0	1	1	1	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1	1	1	1	1
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional (jenis)	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (jenis)	2	3	3	3	3	3	3	3	0	0	1	1	1	1	1
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang diperluas (Unit Gedung)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan															
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan (Dokumen)	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	1	1	1	1	1
Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%)															
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota																
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	0	0	0	160	160	0	0	0	160	160	0	0	0	0	1
Program Perlindungan Perempuan																
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Adanya PERDA Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perda)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Perempuan dan Anak yang terbiasa (Lembaga Anak dan Lembaga Perempuan)															
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan Kelengkapan Anak (Lembaga)	8	8	27	46	56	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)	160	160	160	160	160	0	0	160	0	0	0	0	1	0	0
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah Lembaga Anak yang terbiasa															
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak yang dibentuk (Fasilitas)		19	19	19	19	0	0	0	8	8	0	0	0	0,42	0,42

 Dipindai dengan CamScanner

Rencana Strategis DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur 2023-2026

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																
Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah PLKB yang mendapat dukungan operasional (PLKB)	55	80	80	80	80	60	60	61	61		1	0,75	0,75	0,75	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah PIK Remaja yang Aktif (PIK)															
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota																
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Remaja yang dibina (orang)	60	60	60	60	60	0	0	0	0		0	0	0	0	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina (Orang)															
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina atau dilatih (orang)	80	80	80	80	80	0	0	0	0		0	0	0	0	
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Frekuensi orientasi dan sarasehan (kali)		2	2	2	2	0	0	0	0		0	0	0	0	

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD DP2KBP3A
Kabupaten Flores Timur

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.388.636.336	1.491.690.000	1.422.448.950	3.629.403.683		1.345.041.825	1.531.417.810	1.410.415.726	3.541.773.447		0,96	0,99	0,99	0,97		55,73	52,03
Belanja Program urusan Keluarga Berencana	6.482.723.000	8.066.838.447	6.786.497.435	6.985.281.208		4.670.926.400	6.024.190.846	6.692.371.772	6.229.890.900		0,72	0,74	0,98	0,89		14,40	11,05
Belanja Program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	93.311.500	332.010.000	36.704.800	53.150.300		92.511.500	248.073.400	35.979.800	48.880.300		0,99	0,74	0,98	0,68		70,28	39,50

Dari indikator pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tergambar pada tabel diatas terlihat bahwa selama 4 tahun periode Renstra 2018-2022 pencapaian kinerja belum sepenuhnya memuaskan sesuai dengan target. Hal ini tergambar pada beberapa indikator utama yang mencerminkan kondisi Cakupan PUS Peserta KB Aktif, Cakupan Peserta KB Baru.

Pada indikator Cakupan PUS Peserta KB Aktif, Cakupan Peserta KB Baru terlihat capaian masih dibawah target yang menggambarkan bahwa belum optimalnya pelayanan Keluarga Berencana.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Hasil analisis terhadap Renstra BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa prioritas pembangunan dan pelayanan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan pada upaya untuk Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan kesehatan Reproduksi. Dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan prioritas pada Pemenuhan Hak Anak, Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan. Prioritas di atas sejalan dengan kondisi permasalahan dan kebutuhan dalam pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten Flores Timur dan masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah dan pelaku pembangunan. Dalam upaya mengatasi permasalahan dan menjawab kebutuhan yang dirasakan dalam dua bidang urusan ini diidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur yaitu :

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Masih adanya anggapan KB hanya urusan perempuan
 - b. Kespesertaan pria dalam ber-KB masih rendah
 - c. Kualitas kader/tenaga pendamping belum optimal
 - d. Persentase Unmet Need masih tinggi
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - b. Kesadaran masyarakat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal
 - c. Dukungan terhadap perlindungan perempuan dan anak belum optimal
 - d. Belum maksimalnya pelibatan perempuan dalam proses pembangunan
 - e. Akses permodalan untuk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera kurang
 - f. Sarana dan prasarana penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal
 - g. Lembaga penanganan kasus perempuan dan anak di tingkat kecamatan belum tersedia
 - h. Belum terpenuhinya hak-hak anak sesuai standar

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan meliputi:

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Dukungan dari pemerintah terhadap program Keluarga Berencana semakin besarbaik dari pusat maupun dari Provinsi dan Kabupaten
- b. Komitmen mitra kerja terhadap program Keluarga Berencana semakin besar
- 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Sudah ada forum anak yang dibentuk
 - b. Adanya dukungan dari LSM terkait pemenuhan hak anak
 - c. Adanya kerjasama dengan Forkom P2HP dan Unit PPA terkait perlindungan perempuan dan anak.

Analisa faktor Internal dan faktor external yang berpengaruh terhadap kondisi permasalahan dan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.9
Tabel Analisis Faktor Internal dan External

No	Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi	
		Faktor Internal	Faktor External
1	Masih Rendahnya Kepesertaan Pria ber-KB	Belum optimalnya Kinerja PKB/PLKB di Lapangan	-Kondisi Lingkungan, Sosial dan Budaya - KB hanya urusan perempuan - Rendahnya wawasan masyarakat
2	Masih tingginya Unmeet Need	Masih kurang optimalnya pelayanan KB	-adanya larangan dari keluarga untuk ber KB -adanya anggapan banyak anak banyak rejeki
3	Peserta KB Aktif yang masih rendah	-Belum optimalnya pelayanan KB -SDM yang basiknya tidak sesuai	-Lingkungan, Sosial dan Budaya - Wawasan masyarakat masih rendah
4	Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih ditemukan	-Penyebarluasan informasi yang masih kurang terkait kekerasan perempuan dan anak -belum adanya perda perlindungan Perempuan	-Pernikahan usia dini -Media Sosial -Laki-laki dan Perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kesehatan dan tentu tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan kesehatan, diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi, sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD DP2KBP3A
Kabupaten Flores Timur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Minimnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan KB	Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB	Rendahnya Kinerja Bangsa Kencana melalui KIE yang Intens
			Belum optimalnya penataan pengendalian kependudukan
2	Minimnya Upaya Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rendahnya Upaya Pengarusutamaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rendahnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Rendahnya Keberdayaan Perempuan dan Anak
			Rendahnya Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak

3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi, sehingga tidak dilakukan penelaahan visi misi.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kabupaten Flores Timur, DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu terhadap pencapaian renstra DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur.

Hal tersebut berkaitan dengan penganggaran dan tuntutan dari regulasi tentang perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran Renstra BKKBN sebagai berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN dan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur	Sebagai Faktor Penghambat	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024	Dukungan PLKB/PKB yang belum optimal	Advokasi dan KIE belum maksimal	Dukungan SDM PPKBD/Sub PPKBD dan TPK
2	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.	- Akseptor KB Non MKJP masih cukup besar - Peserta KB pria masih rendah	Kepesertaan KB pria masih rendah	Dukungan pemerintah terhadap program KB cukup besar
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.	Persentase Unmet Need yang masih tinggi 27,95%	Ketersebaran PKB/PLKB baik secara kualitas maupun	Adanya peningkatan kualitas PKB/PLKB bidan/kader melalui pelatihan/bimtek

			kuantitas masih terbatas	
4	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.	Peran serta Pusat Informasi dan konseling Remaja/Mahasiswa belum optimal dan belum terbentuknya kelompok PIKR	Kesadaran masyarakat dan sekolah tentang pentingnya pusat informasi dan konseling remaja belum optimal Pengaruh social budaya	Dukungan lembaga pendidikan cukup besar KIE melalui media cetak dan elektronik
5	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan	Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender belum optimal	Masih rendahnya kesadaran terkait hak-hak perempuan	Adanya dukungan dari Lembaga Forkom P2HP
6	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Dukungan Dana dalam meningkatkan Pemenuhan Hak Anak masih minim, masih terbatasnya desa layak anak.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak anak Dukungan Dana	Adanya Forum Anak Dukungan LSm Pemerhati hak Anak (FREN)
7	Meningkatkan Partisipasi masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam pembangunan PPPA	Dukungan Dana Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pembangunan PPPA masih rendah	Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan kualitas keluarga	Penigkatan kualitas SDM dilapangan baik PKB/PLKB PPKBD/Sub PPKBD dan TPK
8	Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak	UPT PPA belum terbentuk	Dukungan Dananya yang masih minim	Permen No 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang diwilayah Kabupaten Flores Timur tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur. Dengan demikian, dalam penyusunan Renstra ini, tidak dilakukan penelaahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur, dan telaahan terhadap Renstra BKKBN dan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
2. Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan
3. Masih ditemukannya kasus kekerasan dalam rumah tangga
4. Belum terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
5. Partisipasi Perangkat Daerah yang menyediakan data gender dan anak masih rendah
6. Desa/Kelurahan Layak Anak belum tersedia
7. Masih minimnya Data terkait Pengendalian Penduduk
8. Masih tingginya cakupan Unmet need.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2021	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan Keluarga Berencana	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka TFR (%)	3,2	3,1	3,0	2,8	2,6	
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (Point)	91,32	92,24	93,16	94,08	95	
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus)	24	20	19	18	17	
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kasus)	28	25	23	21	19	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan Keluarga Berencana	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Menggerakkan dan Memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB	-Penataan Pengendalian Penduduk -Meningkatnya Kinerja Bangsa Kencana melalui KIE yang intens
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-Meningkatkan Keberdayaan perempuan dan anak -Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan		
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan target Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana program, kegiatan, indikator dan target kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menjalankan 4 program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

dengan dukungan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator dan target kinerja sasaran sebagaimana terlihat tabel 6.1 berikut :Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja SKPD Penggabungan	Lokasi
			URUSAN/ANSUR	BIDANG URUSAN /BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026		Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan			
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berk																						
							DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN				11.268.860.800		10.407.000.000		10.802.030.000		10.940.505.000		43.418.395.800			

ualitas							PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 %	3.887.860.800	100 %	3.547.000.000	100 %	3.562.530.000	100 %	3.627.955.000	100 %	14.625.345.800		
		x	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
								Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		75%		76%		77%		78%		79%			

								Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		50%		52%		53%		54%		55%				
								Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
			x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	6 Dok	4 Dok	75.66 0.000	4 Dok	85.80 0.000	4 Dok	95.00 0.000	4 Dok	107.000.000	16 Dok	363.460.000		
			x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	0	2 Dok	10.00 0.000	2 Dok	20.00 0.000	2 Dok	20.00 0.000	2 Dok	30.00 0.000	8 Dok	80.00 0.000		

[illegible]

[illegible]

								an Laporan Koordina si Penyusu nan Laporan Keuanga n (dok)														
			x	xx	01	2. 02	01	Penyediaa n Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bula n)	28 orang/ 14 bulan	28 ora ng/ 14 bul an	2.300 .000. 000	28 ora ng/ 14 bul an	2.200 .000. 000	28 ora ng/ 14 bul an	2.200 .050. 000	28 ora ng/ 14 bul an	2.320 .000. 000	28 ora ng/ 14 bul an	9.020 .050. 000	DP2K BP3A	Lara ntu ka
			x	xx	01	2. 02	02	Penyediaa n Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah Dokume n Hasil Penyedia an Administ rasi Pelaksan aan Tugas ASN	0	0	0	12 Dok	54.00 0.000	12 Dok	54.00 0.000	12 Dok	54.00 0.000	12 Dok	54.00 0.000	DP2K BP3A	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

			x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	0	1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.000.000	1 Orang	30.000.000	1 Orang	10.000.000	4 Orang	60.000.000		
			x	xx	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	20.000.000	DP2K BP3A	Larangan
			x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	0	1 Orang	5.000.000	1 Orang	5.000.000	1 Orang	25.000.000	1 Orang	5.000.000	4 Orang	40.000.000		

			x	xx	01	2.05	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasar kan Tugas dan Fungsi yang Mengiku ti Pendidik an dan Pelatiha n (orang)	0	1 Ora ng	10.00 0.000	1 Ora ng	10.00 0.000	1 Ora ng	30.00 0.000	1 Ora ng	10.00 0.000	4 Ora ng	60.00 0.000		
			x	xx	01	2.05	Koordinasi dan Pelaksanaa n Sistem Informasi Kepegawai an	Jumlah Dokume n Hasil Koordina si dan Pelaksan aan Sistem Informasi Kepegaw aian	0	1 Dok	5.000 .000	1 Dok	5.000 .000	1 Dok	5.000 .000	1 Dok	5.000 .000	1 Dok	20.00 0.000	DP2K BP3A	Lara ntu ka
			x	xx	01	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarka	Jumlah Pegawai Berdasar kan Tugas	0	1 Ora ng	5.000 .000	1 Ora ng	5.000 .000	1 Ora ng	25.00 0.000	1 Ora ng	5.000 .000	4 Ora ng	40.00 0.000		

[illegible]

			x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (paket)	0	3 Paket	25.000.000	3 Paket	10.000.000	3 Paket	11.000.000	3 Paket	12.000.000	12 Paket	58.000.000	DP2K BP3A	Larangan
			x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket)	0	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.500.000	1 Paket	6.000.000	1 Paket	6.500.000	8 Paket	23.000.000		
			x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	0	12 Paket BBM, 12 Paket Makanan Min	60.000.000	3 Paket ATK	24.000.000	3 Paket ATK	25.000.000	3 Paket ATK	26.000.000	21 Paket	135.000.000	DP2K BP3A	Larangan

			x	xx	01	2. 06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)	1 paket Jilid dan 1 Paket Penggandaan	um 1 paket Jilid dan 1 Paket Penggandaan	20.00 0.800	1 paket Jilid dan 1 Paket Penggandaan	16.50 0.000	1 paket Jilid dan 1 Paket Penggandaan	18.93 0.000	1 paket Jilid dan 1 Paket Penggandaan	20.64 5.000	4 paket Jilid dan 4 Paket Penggandaan	76.07 5.800	DP2K BP3A	Larangan
			x	xx	01	2. 06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1 Laporan	12 Laporan	12.00 0.000	12 Laporan	28.00 0.000	12 Laporan	28.00 0.000	12 Laporan	28.00 0.000	48 Laporan	96.00 0.000	DP2K BP3A	Larangan
			x	xx	01	2. 06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1 Laporan	12 Laporan	25.00 0.000	12 Laporan	25.00 0.000	12 Laporan	27.30 0.000	12 Laporan	27.30 0.000	12 Laporan	104.6 00.000	DP2K BP3A	Dalam Luar Daerah

[illegible]

			x	xx	01	2. 07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset tak berwuju d Lainnya yang Disediak an		1 unit We bsit e Din as							1 unit We bsit e Din as	0	DP2K BP3A	Lara ntu ka
			x	xx	01	2. 07	10	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang Disediak an		5 Unit Lap top, 5 Unit Prin ter	50.00 0.000	1 Unit	4.000 .000				11 Unit t	54.00 0.000	DP2K BP3A	

			x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 Unit Pag ar dan Par kira n,T eral i, gor den	80.000.000			1	1.000.000			1 Unit Pag ar dan Par kira n,T eral i, gor den	81.000.000	DP2K BP3A	Lara ntuka
			x	xx	01	2.08		Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerint han Daerah	Persenta se pemenu han jasa penunja ng Urusan Pemerint ah Daerah(%)		90	930.000.000	90	930.000.000	90	929.950.000	95	930.000.000	95	3.719.950.000		
			x	xx	01	2.08	01	Penyediaa n Jasa Surat	Jumlah laporan penyedia	1 Lapora	12 Lap ora	2.200.000	12 Lap ora	2.200.000	12 Lap ora	2.150.000	12 Lap ora	2.200.000	48 Lap ora	8.750.000	DP2K BP3A	Lara unt

								Menyurat	an jasa surat menyura t (laporan)	n	n		n		n		n		n		uka	
			x	xx	01	2. 08	02	Penyediaa n Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak an(lapor an)	1 Lapora n	12 Lap ora n	25.00 0.000	12 Lap ora n	25.00 0.000	12 Lap ora n	25.00 0.000	12 Lap ora n	25.00 0.000	48 Lap ora n	100.0 00.00 0	DP2K BP3A	Lara ntu ka
			x	xx	01	2. 08	03	Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Peralata n dan Perlengkap an Kantor yang Disediak	0	1 Lap ora n	10.00 0.000	1 Lap ora n	10.00 0.000	1 Lap ora n	10.00 0.000	1 Lap ora n	10.00 0.000	4 Lap ora n	40.00 0.000	DP2K BP3A	Lara ntu ka

									an													
			x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	1 Laporan 93 Tenaga	12 Laporan 93 Tenaga	892.800.000	12 Laporan 93 Tenaga	892.800.000	12 Laporan 93 Tenaga	892.800.000	12 Laporan 93 Tenaga	892.800.000	48 Laporan 93 Tenaga	3.571.200.000	DP2K BP3A	Larantuka
			x	xx	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)	(servis, pajak,perpanjangan STNK dan suku cadang)	90	201.200.000	90	105.200.000	90	103.300.000	95	41.510.000	95	451.210.000		

				x	xx	01	2. 09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (servis, pajak, perpanjangan STNK dan suku cadang)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan ya	0	Pajak kendaraan roda dua 32 unit, Pembayaran Pajak 4 unit roda 4, 1 unit kapal motor laut, servis, Suku cadang, 130.000.000	Pembayaran Pajak 4 unit roda 4, 1 unit kapal motor laut, servis, Suku cadang, 70.000.000	Pembayaran Pajak 4 unit roda 4, 1 unit kapal motor laut, servis, Suku cadang, 70.000.000	Pembayaran Pajak 4 unit roda 4, 1 unit kapal motor laut, servis, Suku cadang, 7.000.000	Pajak kendaraan roda dua 32 unit, Pembayaran Pajak 4 unit roda 4, 1 unit kapal motor laut, servis, Suku cadang, 277.000.000	DP2K BP3A	Larantuka
--	--	--	--	---	----	----	----------	----	--	--	---	---	--	--	---	---	-----------	-----------

										ang								ang, BB M				
			x	xx	01	2. 09	08	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	1 Aset Website	4.200.000	1 Aset Website	4.200.000	1 Aset Website	4.200.000	1 Aset Website	4.200.000	1 Aset Website	16.800.000	DP2K BP3A	Larangan
			x	xx	01	2. 09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi (unit)	1 Unit	1 Unit Gedung dan 1 unit Balai Penyuluhan	42.000.000	1 Unit Gedung	11.000.000	1 Unit Gedung	9.100.000	1 Unit Gedung	10.310.000	2 Unit Gedung	72.410.000	DP2K BP3A	Larangan

			x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (unit)		5 unit Laptop, 4 unit Printer	15.000.000	5 unit Laptop, 4 unit Printer	10.000.000	5 unit Laptop, 4 unit Printer	10.000.000	5 unit Laptop, 4 unit Printer	10.000.000	5 unit Laptop, 4 unit Printer	45.000.000	DP2K BP3A	Larangan
			x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Pagar Halaman dan Parkiran	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	40.000.000	DP2K BP3A	Larangan

[illegible]

								Responsi f Gender (PPRG) bagi Organisa si Pemerint ah Kewenan gan Kab/Kota (perangk at daerah)												
								Pemberda yaan Perempua n Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasa i Kemasyara katan Kewenang an Kab/Kota	Jumlah Dokume n Hasil Advokasi dan Sosialisa si Peningka tan Partisipa si Perempu an Bidang Politik, Sosial dan	0	1 Dok	70.00 0.000	1 Dok	70.00 0.000	1 Dok	70.00 0.000	1 Dok	80.00 0.000	4 Dok	290.0 00.00 0

								Ekonomi dan Organisasi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota (dokumen)													
							Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	0	1 Dok	30.00 0.000	1 Dok	30.00 0.000	1 Dok	40.00 0.000	1 Dok	40.00 0.000	4 Dok	140.00 0.000	DP2K BP3A	Larangan

[illegible]

									Ekonomi Kewenangan Kab/Kota (organisasi)													
								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempua n Kewengan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberd ayaan Perempu an Kewenang an Kab/Kot a (lembaga)		26 Ora ng	25.00 0.000	30 Ora ng	30.00 0.000	26 Ora ng	40.00 0.000	26 Ora ng	36.05 0.000	128 Ora ng	131.0 50.00 0	DP2K BP3A	Lara ntuka
								Peningkata n Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	0	26 Ora ng	25.00 0.000	30 Ora ng	30.00 0.000	26 Ora ng	40.00 0.000	26 Ora ng	36.05 0.000	128 ora ng	131.0 50.00 0	DP2K BP3A	Lara ntuka

							Layanan Pemberdayaan Perempua n Kewenang an Kab/Kota	Pemberd ayaan Perempu an Kewenang an Kab/Kota Yang Mendap at Peningka tan Kapasitas														
		Jumla h Kasus Keker asan terha dap Pere mpua n	2	08	03			PROGRAM PERLINDU NGAN PEREMPU AN	Persenta se Kasus Kekerasa n dalam Rumah Tangga yang terselesa ikan (%)	0,002%	0,0 01%	55.00 0.000	0,0 01%	55.00 0.000	0,0 01%	60.00 0.000	0,0 01%	60.00 0.000	0,0 01%	230.0 00.00 0		

								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Tingkat Daerah Kab/Kota yang mendapat Penguatan dan Pengembangan (orang)		24 Ora ng	55.00 0.000	24 Ora ng	55.00 0.000	24 Ora ng	60.00 0.000	24 Ora ng	60.00 0.000	96 Ora ng	230.0 00.00 0		
			2	08	03	2. 03		Peningkatan Kapasitas sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan	0	24 Ora ng	25.00 0.000	24 Ora ng	25.00 0.000	24 Ora ng	30.00 0.000	24 Ora ng	25.00 0.000	96 ora ng	105.0 00.00 0	DP2K BP3A	Lara ntu ka

								Kekerasan Kewenang an Kab/Kota	Korban Kekerasa n Kewenan gan Kab/Kota (orang)													
			2	08	03	2. 03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindung an Perempua n Kewenang an Kab/Kota	Jumlah Dokume n Hasil Penguata n Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindu ngan Perempu an Kewenan gan Kab/Kota (dokume n)	0	1 Dok	30.00 0.000	1 Dok	30.00 0.000	1 Dok	30.00 0.000	1 Dok	35.00 0.000	4 Dok	125.0 00.00 0	DP2K BP3A	Lara ntu ka
			2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS	Peringka t Pusat pembela jaran Keluarga		Ting kat Prat am	160.0 00.00 0	Ting kat Ma dya	145.0 00.00 0	Ting kat Nin dini	210.0 00.00 0	Ting kat Uta ma	220.0 00.00 0	Ting kat Uta ma	735.0 00.00 0		

[illegible]

			2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (lembaga)	0	4 Lem bag a	35.00 0.000	2 Lem bag a	25.00 0.000	3 Lem bag a	50.00 0.000	3 Lem bag a	40.00 0.000	12 Lem bag a	150.0 00.00 0	DP2K BP3A	Lara ntu ka
			2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningka	0	10 Ora ng	38.00 0.000	10 Ora ng	35.00 0.000	15 Ora ng	40.00 0.000	10 Ora ng	50.00 0.000	45 Ora ng	163.0 00.00 0	DP2K BP3A	Lara ntu ka

								/Kota	tan Kapasitas Keluarga Kewenan gan Kab/KOt a (orang)													
								Penguatan Jaringan antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkata n Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokume n Hasil Penguata n Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningka tan Kualitas Keluarga Kewenan gan Kabupat en/Kota (dokume n)	0	1 Dok	30.00 0.000	1 Dok	30.00 0.000	1 Dok	40.00 0.000	1 Dok	50.00 0.000	4 Dok	150.0 00.00 0	DP2K BP3A	Lara ntu ka
			2	08	04	2.	03															

			2	08	04	2.03		Penyediaa n Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudk an KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Data Gender dan Anak, untuk Dimanfa atkan dalam Pengamb ilan Kebijaka n Anak Kabupat en/Kota (laporan)	0	1 Lap ora n	27.00 0.000	1 Lap ora n	20.00 0.000	1 Lap ora n	40.00 0.000	1 Lap ora n	40.00 0.000	4 Lap ora n	127.0 00.00 0	Dinas Pendi dikan, Keseh atan, sosial , kapol res, rsud, YPPS, Fren, Pekso s, forko m P2HP	Lara ntu ka
			2	08	04	2.03	01	Pelaksanaa n Penyediaa n Layanan Komprehe nsif bagi Keluarga dalam Mewujudk an KG dan Perlindung an Anak yang Wilayah	Jumlah Layanan Kompreh ensif bagi Keluarga dalam Mewuju dkan Kesetara an Gender (KG) dan Perlindu ngan	0	1 Lay ana n	27.00 0.000	1 Lay ana n	20.00 0.000	1 Lay ana n	40.00 0.000	1	40.00 0.000	1 Lay ana n	127.0 00.00 0	DP2K BP3A	Lara ntu ka

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Kab/Kota	han Hak Anak Kewenangan Kab/Kota (dokumen)														
			2	08	06	2.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota (orang)	0	35 Orang	80.00 0.000	30 Orang	80.00 0.000	35 Orang	90.00 0.000	20 Orang	64.00 0.000	120 Orang	314.0 00.000	DP2K BP3A	Lara ntu ka
			2	08	06	2.	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan	0	35 Orang	35.00 0.000	30 Orang	35.00 0.000	35 Orang	40.00 0.000	20 Orang	30.00 0.000	120 Orang	140.0 00.000	DP2K BP3A	Lara ntu ka

[illegible]

	M en in gk at ka n Pe ng en da lia n Pe n d u d uk da n K el ua rg a B er en ca na		2	14			URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCAN A			6.851 .000. 000	6.365 .000. 000	6.619 .500. 000	6.722 .500. 000	26.55 8.000 .000							
	Menu runka n Angk a Kelah iran Total (TFR)	2	14	02			PROGRAM PENGEND ALIAN PENDUDU K	Jumlah dokume n Pengend alian Pendudu k (Dokume n)	4 Dok	7 Dok	185.0 00.00 0	6 Dok	90.00 0.000	6 Dok	104.5 00.00 0	6 Dok	105.0 00.00 0	25 Dok	484.5 00.00 0		

			2	14	02	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Laporan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sarasehan dan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana		1 Lap ora n	35.00 0.000		0		0		0	1 Lap ora n	35.00 0.000		
			2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	0	1 Dok	35.00 0.000						1 Dok	35.00 0.000	DP2K BP3A	Lara ntu ka

[illegible]

			2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan (dokumen)	0	5 Dok	50.00 0.000	5 Dok	6.000 .000	5 Dok	15.00 0.000	5 Dok	10.00 0.000	20 Dok	81.00 0.000	DP2K BP3A	Larangan
			2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		3 Laporan	0	3 Laporan	20.00 0.000	3 Laporan	20.00 0.000	3 Laporan	15.00 0.000	12 Laporan	55.00 0.000	DP2K BP3A	Larangan
			2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia		1 Dokumen	50.00 0.000	1 Dokumen	9.000 .000	1 Dokumen	12.00 0.000	1 Dokumen	15.00 0.000	4 Dok	86.00 0.000	DP2K BP3A	Larangan
			2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpul	Jumlah Laporan Pencatat		3 Laporan	0	12 Laporan	40.00 0.000	12 Laporan	40.00 0.000	12 Laporan	50.00 0.000	39 Laporan	130.00 0.000	DP2K BP3A	Larangan

								lan Data Keluarga	an dan Pengumpulan Data Keluarga		n		n		n		n	0		ka		
			2	14	02	2.02	13	Pengelolaan dan Pelaporan Data pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		1 Dokumen	0	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	37 Dokumen	30.000.000	DP2K BP3A	Larantuka
			2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	52,5%	53,63%		54,75%		55,87%		57%		57%			
									Cakupan Akseptor Baru (%)	58,50%	62%	6.565.000.000	65%	6.165.000.000	68%	6.365.000.000	70%	6.485.000.000	70%	25.580.000.000		

			2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		1 Dok	500.000.000	1 Dok	510.000.000	1 Dok	495.000.000	1 Dok	495.000.000	4 Dok	2.000.000.000	DP2K BP3A	Larangan
			2	14	03	2.01	Advokasi Program KBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pemban		15 Organisasi	0	15 Organisasi	70.000.000	15 Organisasi	100.000.000	15 Organisasi	100.000.000	15 Organisasi	270.000.000	DP2K BP3A	Larangan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Keluarga Berencana																			
			2	14	03	2.	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengedalian Program KKBPK	2 Lap ora n	0	2 Lap ora n	60.00 0.000	2 Lap ora n	40.00 0.000	2 Lap ora n	40.00 0.000	8 Lap	140.0 00.00 0	DP2K BP3A	19 Kec					
			2	14	03	2.	02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendaya gunaan Tenaga Penyulu h KB/Petu gas Lapanga n KB (PKB/PL KB)	1 Lap ora n	300.0 00.00 0	1 Lap ora n	270.0 00.00 0	1 Lap ora n	340.0 00.00 0	1 Lap ora n	340.0 00.00 0	4 Lap ora n	1.250 .000. 000							

			2	14	03	2.	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0	15 Organisasi	150.000.000	15 Organisasi	50.000.000	15 Organisasi	20.000.000	15 Organisasi	20.000.000	60 Organisasi	240.000.000	DP2K BP3A	19 Kec
			2	14	03	2.	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	0					5 Unit	20.000.000			5 Unit	20.000.000		

[illegible]

[illegible]

			2	14	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Jumlah Jenis Alat Kontrasepsi yang didistribusikan dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota		5 Jenis	5.571 .000. 000	5 Jenis	5.294 .600. 000	5 Jenis	5.385 .550. 000	5 Jenis	5.521 .200. 000	5 Jenis	21.77 2.350 .000		
			2	14	03	2.03	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke	0	6 Laporan	5.171 .000. 000	6 Laporan	5.085 .600. 000	6 Laporan	5.185 .550. 000	6 Laporan	5.356 .200. 000	24 Laporan	20.79 8.350 .000	DP2K BP3A	Lara ntu ka

[illegible]

[illegible]

			2	14	03	2. 03	11	Dukungan Operasion al Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukunga n Operasio nal Pelayana n KB Bergerak (laporan)	0	1 Lap ora n	100.0 00.00 0	1 Lap ora n	35.00 0.000	1 Lap ora n	45.00 0.000	1 Lap ora n	50.00 0.000	4 Lap ora n	230.0 00.00 0	DP2K BP3A	Lara ntu ka
			2	14	03	2. 03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengiku ti Promosi dan Konselin g KB Pasca Persalina n dan Pasca Kegugura n	0	500	100.0 00.00 0	450	24.00 0.000	525	25.00 0.000	520	25.00 0.000	1.9 95	174.0 00.00 0	DP2K BP3A	19 Kec

[illegible]

							Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (organisasi)	0	5 Org anis asi	100.0 00.00 0	6 Org anis asi	23.00 0.000	12 Org anis asi	49.45 0.000	8 Org anis asi	38.80 0.000	31 Org anis asi	211.2 50.00 0	DP2K BP3A	Lara ntu ka
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------------------	---------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------	--------------------------	---------------------	--------------	-------------------

			2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (dokumen)	0	1 Dok	39.000.000	35 Dok	25.000.000	35 Dok	35.000.000	35 Dok	30.000.000	106	129.000.000	DP2K BP3A	Larangan
			2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan)		35 Kampung KB	0	35 Kampung KB	20.000.000	35 Kampung KB	20.000.000	35 Kampung KB	20.000.000	35 Kampung KB	60.000.000	DP2K BP3A	Larangan

[illegible]

[illegible]

							Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Landia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Landia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan	BKB :13 5, BKR :52 BKB:13 5, BKR:39, BKL:86, PIKR:35 UPPKS: 25	BKB :13 5, BKR :52 BKL: 41 PIK R:5 4, UPP KS:5 7	21.00 0.000	BKB :57, BKR :53 BKL: 41, PIK R:5 4, UPP KS:5 6	42.00 0.000	BKB :58 BKR :53 BKL: 41, PIK R:5 3, UPP KS:5 6	50.00 0.000	BKR :52, BKL: 41, PIK R:5 3, UPP KS:5 6	50.00 0.000	BKR :52, BKL: 41, PIK R:5 3, UPP KS:5 6	213.0 00.00 0	DP2K BP3A	Larangan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	----------------	--	----------------	---	----------------	--	----------------	--	---------------------	--------------	----------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						Penumbuh an dan Peningkata n Kesadaran Keluarga dalam Keterlibata n Perencana an Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengiku tu Pertumb uhan dan Peningka tan Kesadara n Keluarga dalam Keterliba tan Perencana aan Kehidupa n Menuju Keluarga Berkualit as	0	300 Kel uar ga	10.00 0.000	300 Kel uar ga	28.00 0.000	300 Kel uar ga	50.00 0.000	300 Kel uar ga	40.00 0.000	120 0 Kel uar ga	178.0 00.00 0	DP2K BP3A	Lara ntu ka
--	--	--	--	--	--	--	---	---	-------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-------------------------	----------------	---------------------------	---------------------	--------------	----------------

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah tahun 2023-2026 sebagaimana terlihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dan Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	9
Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD							
	Angka Kelahiran Total (TFR)	3,2	3,1	3,0	2,8	2,6	2,6
	Indeks Pembangunan Gender	91,32	92,24	93,16	94,08	95	95
	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Kasus)	24	20	19	18	17	17
	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak (Kasus)	28	25	23	21	19	19
Indikator Kinerja Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan							
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	9
	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	3	3	3	3	3	3
	Angka Kelahiran Total (TFR)	3,2	3,1	3,0	2,8	2,6	2,6
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif (mCPR)	52,51%	53,63	54,75	55,87	57	57
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	27,95	22	20	18	16	16
	Ratio Akseptor KB	51,24	69	62	65	67	67
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling remaja/mahasiswa	15,78	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00
Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	Indeks Pembangunan Gender	91,32	92,24	93,16	94,08	95	95
	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Kasus)	24	20	19	18	17	17
	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak (Kasus)	28	25	23	21	19	19
	Persentase partisipasi perempuan di sector public	45,72	46,00	47,00	47,50	48,00	48,00
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	3,3	3,3	6,6	6,6	6,6	6,6
	Rasio KDRT	0	0	0	0	0	0
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	47,17	47,50	48,20	48,40	49,00	49,00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD, memuat antara lain tujuan dan sasaran SKPD, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Renstra DP2KBP3A merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan DP2KBP3A dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra DP2KBP3A sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja DP2KBP3A setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan DP2KBP3A yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-DP2KBP3A).

Akhir kata semoga Renstra DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja DP2KBP3A.

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Flores Timur,**



Sri Ardi Raharju, S.Sos.MAP
Pembina Tingkat I
NIP. 19691016 199903 2 007